

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

REDD+ merupakan rezim internasional yang menggantikan rezim internasional sebelumnya yaitu protokol kyoto. Bergantinya rezim protokol kyoto menjadi REDD+ karena banyak negara-negara yang menolak menerapkan kebijakan dari protokol kyoto selain itu juga dalam kebijakaannya masih terdapat yang kurang. Sedangkan REDD+ memiliki kebijakan dan kelengkapan dalam penanganan mengenai pengurangan emisi yang membuat masing-masing negara tertarik untuk ikut serta terutama negara maju yang memberontak pada saat protokol kyoto. Cakupan REDD+ itu sendiri mengenai pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi dengan tujuan-tujuan dan langkah melindungi hutan dan didalam REDD+ juga memberikan kemudahan kepada masing-masing negara sesuai dengan kemampuan dengan salah satu contoh untuk mempermudah berjalannya kegiatan REDD+ yaitu dengan memberikan kompensasi financial seperti negara maju memberikan bantuan berupa dana kepada negara berkembang sebagai bentuk pengganti pengurangan emisinya.

Terbentuk REDD+ ini memiliki proses yang panjang untuk menjadikan suatu rezim internasional yang dapat berjalan secara efektif. REDD+ terbentuk dibawah naungan Konvensi Perubahan Iklim PBB yaitu UNFFCCC yang dilaksanakan melalui COP sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan

keputusan. COP terdiri dari negara-negara yang bergabung dalam UNFCCC. Pembentukan REDD+ dimulai dari COP 13 yang merupakan tahap awal terbentuknya REDD+ yang dimana nama REDD+ belum terdapat + dan cakupannya masih sebatas pengurangan emisi saja yang kemudian dilanjutkan pada COP 14 menjadi REDD+ dan memiliki cakupan yang lebih luas lagi. Setiap dari pertemuan COP REDD+ menghasilkan beberapa kebijakan dan mekanisme dalam menjalankan REDD+ hingga REDD+ mendapat banyak dukungan dan masing-masing negara maju dan berkembang menyetujui dan sepakat pada COP 21 yang disebut dengan *Paris Agreement*. Pada COP 21 inilah REDD+ mendapatkan kebulatan suara yang dimana tidak ada negara yang melakukan veto.

Pada indikator kebulatan suara dan kekuatan aturan REDD+ berjalan kurang efektif karena yang berjalan hanya pada kebulatan suara terdapat kendala pada kekuatan aturan tetapi untuk memastikan kembali perlu dilanjutkan di indikator selanjutnya pada tingkat regulasi mengenai kepatuhan yang dijabarkan pada tahap outcome dan dilanjutkan pada tahap impact yang menjelaskan mengenai implementasi kebijakan REDD+ di masing-masing negara yang dimana peneliti mengambil negara Norwegia sebagai negara maju dan Indonesia sebagai negara berkembang. Norwegia merupakan negara yang pendonor terbesar sedunia dalam skema REDD+. Norwegia sangat mendukung skema REDD+ dengan membentuk badan seperti NIFCI dan melakukan bentuk kerjasama dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bentuk kerjasama yang mencetuskan sebuah kebijakan dari negara Norwegia mengenai skema REDD+. Norwegia dalam kebijakannya menjalankan semua sesuai dengan aturan-aturan REDD+ yang telah

dicetuskan di COP salah satunya adalah memprioritas masyarakat adat untuk dapat ikut serta dalam kegiatan REDD+. Aturan REDD+ di negara Norwegia berjalan secara efektif kebijakan semua sesuai dengan aturan yang ada selain itu juga dampak yang diberikan pun positif bagi Norwegia dalam ekonomi, teknis ,kebijakan, dan lingkungan seperti halnya dalam pembentukan kebijakan agar menjadi negara bebas emisi untuk melindungi lingkungan dalam jangka panjang.

Kemudian jika dilihat dari negara Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang berani melakukan komitmen pada saat itu untuk melakukan pengurangan emisi secara sukarela aturan REDD+ diterapkan oleh Indonesia dengan baik. Indonesia menerapkan aturan-aturan REDD+ itu kedalam kebijakan di negaranya sebagai contoh pembentukan MRV yang terdapat pada permen lingkungan hidup No.15 tahun 2013. Selain itu Indonesia juga membentuk badan seperti IFCA untuk membantu menjalankan REDD+. Seluruh kebijakan yang dicantumkan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang dibahas dalam COP. Efek Indonesia menjalankan keseluruhan dari kebijakan dan terus memperbaharui kebijakan membuat Indonesia berhasil menurunkan emisi pada tahun 2020. Hasil dari keseluruhan peneliti mengambil kesimpulan bahwa efektifitas rezim REDD+ yang dijalankan oleh Norwegia dan Indonesia berjalan secara efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan secara keseluruhan alangkah baik terdapat penelitian selanjutnya untuk meningkat kembali agar pengetahuan yang didapat menjadi luas. Peneliti menyarankan untuk penelitian

selanjutnya di bahas pada negara lain yang menerapkan rezim REDD+ sesuai dengan teori yang peneliti gunakan agar data dan pengetahuan lebih luas dan menyempurnakan hasil dari yang peneliti jalankan. Selain itu penelitian selanjutnya bisa membahas mengenai rezim internasional lainnya yang menerapkan kebijakan didalam negara dengan tetap menggunakan konsep efektifitas rezim. Penelitian selanjutnya nantinya akan sangat bermanfaat sekali untuk memperkenalkan konsep ini untuk digunakan kembali.

